SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUH. CHAIRUL FAJRIN

A011191048

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAIRUL FAJRIN

A011191048

kepada

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAIRUL FAJRIN

A011191048

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 31 Juli 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®	Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si.
NIP 19640106 198803 2 001	NIP 19611018 198702 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAIRUL FAJRIN

A011191048

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal 15 Agustus 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®	Ketua	1. .....
2.	Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si.	Sekretaris	2. .....
3.	Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM®	Anggota	3. .....
4.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®	Anggota	4. .....

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Muh. Chairul Fajrin
Nim	: A011191048
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Jenjang	: Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul

"Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan"

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang Menyatakan

(Muh. Chairul Fajrin)
A011191048

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamiin puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia dan anugerah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan"** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu Bapak Suardi Suaprman dan Ibu Hj. Bahira yang terus memberikan banyak doa dan didikan serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, dan kebahagiaan. Kepada saudari Miftahul Jannah dan Nursa'ada terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar Suparman dan Husain, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. CWM®, CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®. Selaku pembimbing I. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan kepada Ibu beserta keluarga atas kesabaran dan kebaikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. A. Baso Siswadarma selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing II. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini serta nasehat dan arahan kepada penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Bapak beserta dengan keluarga kesehatan dan juga kebahagiaan.
6. Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM® dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®. Selaku dosen penguji. Terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk hadir, dimulai dari Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi serta memberikan masukan dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memebrikan ilmu, motivasi, nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Ilmu yang diberikan insyaallah dapat menjadi amal jariyah.
8. Saudara seperjuangan formiga, panter berkemah & teman-teman Ilmu Ekonomi-19 Griffins yang tidak sempat saya cantumkan namanya satu persatu, semoga kedepannya silaturahmi tetap terjaga.

9. Teman dan sahabat Wisuda 2023 & Calon Orang Sukses, terima kasih atas waktu dan dukungannya selama masa perkuliahan terutama di akhir masa studi ini, penulis berharap semoga kedepannya silaturahmi tetap terjaga.
10. Anggota kesekretariatan KSEI FoSEI UNHAS, terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya selama satu periode kepengurusan.
11. Teman-teman KKNT Perhutanan Sosial Pinrang 108 terkhusus Posko 3, terima kasih atas waktu dan pengalaman yang tidak terlupakan selama kurang lebih dua bulan, semoga kedepannya silaturahmi tetap terjaga.
12. Sahabat Cross Four, terima kasih atas kebersamaannya, canda tawa & energi positifnya, semoga kedepannya silaturahmi masih terus tetap terjaga.

Makassar, 17 Agustus 2023

Muh. Chairul Fajrin

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Chairul Fajrin

Fatmawati

A. Baso Siswadarma

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk usia kerja dan mutu sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru tahun 2000-2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) serta diolah menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan mutu sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Usia kerja, Mutu Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

ANALYSIS OF OPEN UNEMPLOYMENT RATE IN BARRU DISTRICT SOUTH SULAWESI PROVINCE

Muh. Chairul Fajrin

Fatmawati

A. Baso Siswadarma

This study aims to analyze the effect of government spending, the number of working age population and the quality of human resources on the open unemployment rate in Barru District, South Sulawesi Province. This type of research is quantitative using secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Regional Financial and Asset Management Agency of Barru Regency in 2000-2022. The analytical method used is multiple linear regression with approximation *Ordinary Least Square* (OLS) and processed using Eviews 10 software. The results of this study indicate that government spending has a positive effect on the open unemployment rate, the working age population has a positive effect on the open unemployment rate and the quality of human resources has a negative effect on the open unemployment rate.

Keywords: Open Unemployment Rate, Government Expenditure, Total Working Age Population, Quality of Human Resources.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
BAB I **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
BAB II **11**
2.1 Tinjauan Teoritis 11
2.1.1 Pengangguran 11
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah 13
2.1.3 Jumlah Penduduk 16
2.1.4 Mutu Sumber Daya Manusia 17
2.2 Hubungan Antar Variabel 21
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 21
2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk Usia Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 22
2.2.3 Hubungan Mutu Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 22
2.3 Tinjauan Empirik 23
2.4 Kerangka Pikir 25
2.5 Hipotesis Penelitian 25
BAB III **27**

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 27
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data 27
3.3 Metode Pengumpulan Data 27
3.4 Metode Analisis 28
3.3.1 Analisis Regresi Berganda 28
3.5 Uji Asumsi Klasik 29
3.5.1 Uji Normalitas 29
3.5.2 Uji Multikolinearitas 30
3.5.3 Uji Autokorelasi 30
3.5.4 Uji Heteroskedastisitas 30
3.6 Uji Hipotesis 31
3.6.1 Uji F (Simultan) 31
3.6.2 Uji T (Parsial) 31
3.7 Definisi Operasional Variabel 32
BAB IV 33
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 33
4.2 Perkembangan Umum Variabel Penelitian 33
4.2.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 33
4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 35
4.2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja 37
4.2.4 Perkembangan Mutu Sumber Daya Manusia 39
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 41
4.3.1 Uji Normalitas 41
4.3.2 Uji Multikolinearitas 41
4.3.3 Uji Autokorelasi 42
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 43
4.4 Hasil Estimasi 43
4.5 Pengujian Hipotesis 44
4.5.1 Uji F Statistik 44
4.5.2 Uji T Statistik 45
4.6 Pembahasan Hasil Estimasi Penelitian 46
4.6.1 Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 46

4.6.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....47
4.6.3 Mutu Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....48
BAB V 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran.....51
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 55

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru 2000-2022 34
Tabel 4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barru 2000-2022 (Rupiah) 36
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Barru 2000-2022 (Jiwa) 38
Tabel 4.4 Perkembangan Mutu SDM (IPM) Kabupaten Barru 2000-2022 (Persen) 40
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas dengan Jarque-Bera 41
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor 42
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 42
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode White 43
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Grafik 1.1 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022 2
Grafik 1.2 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barru 2018-2022 4
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Barru 2018-2022 5
Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru 2018-2022 8
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sekitar 275,77 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 143,72 juta jiwa (BPS, 2022). Peningkatan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja akan berdampak pada pengangguran. Berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pengangguran di suatu negara dapat diketahui kondisi perekonomian negara tersebut bertumbuh atau mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima masyarakat negara tersebut.

Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya laju perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang proporsinya cenderung kecil. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja (Pitartono, & Hayati, 2012). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran (Corolina & Panjawa, 2020).

Menurut BPS (2021), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berikut disajikan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

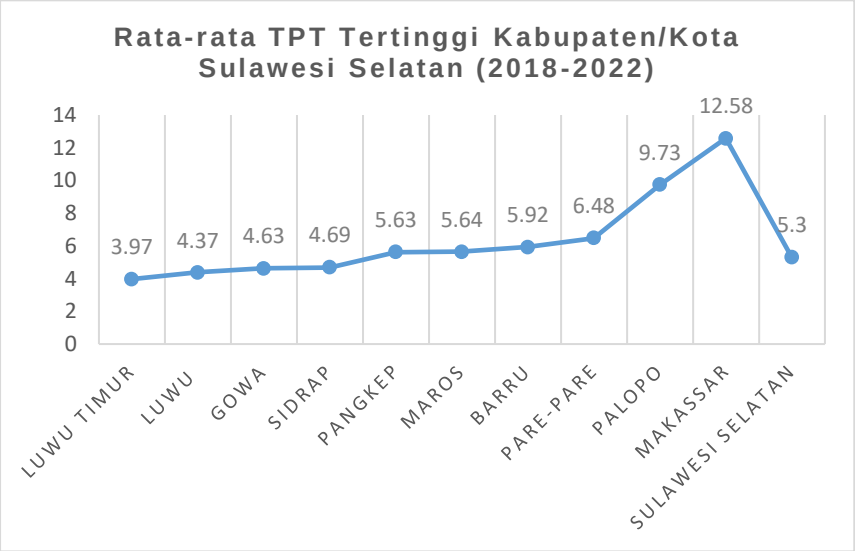

Sumber: BPS Prov. Sulsel 2023

Grafik 1.1 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022

Grafik diatas menampilkan sepuluh daerah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi selama lima tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Barru termasuk daerah dengan TPT kategori tertinggi di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata TPT Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir menempati posisi ke-4 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar, Palopo, dan Pare-Pare. Jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Sulawesi Selatan lima tahun terakhir yang sebesar 5,3 persen maka TPT Kabupaten Barru tersebut masih cenderung tetap berada diatas. Selain itu angka rata-rata TPT Kabupaten

Barru selama 23 tahun terakhir (2000-2022) sebesar 7,47 persen. Persentase angka pengangguran tersebut melebihi tingkat pengangguran alamiah yang biasanya berkisar antara 2-3 persen. Menurut Sukirno (2008), tingkat pengangguran alamiah merupakan suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tidak dapat dihilangkan artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi berkisar antara 2-3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).

Dampak dari tingginya angka pengangguran berakibat pada menurunnya tingkat perekonomian negara. Menurut Franita (2019), beberapa dampak yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran yakni seperti dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Hal tersebut akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup. Kedua yaitu dampak dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan, banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Terakhir yaitu dari segi keamanan, banyaknya pengangguran akan menyebabkan para penganggur untuk melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, bahkan tindakan penipuan.

Dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Dalam upaya menyediakan barang publik pemerintah secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Tersedianya lapangan kerja akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran (Rachim, 2013). Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Barru terus mengalami penurunan, rendahnya

pengeluaran pemerintah diikuti dengan tingkat pengangguran yang fluktuatif dan cenderung tinggi. Berikut disajikan data pengeluaran pemerintah Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir.

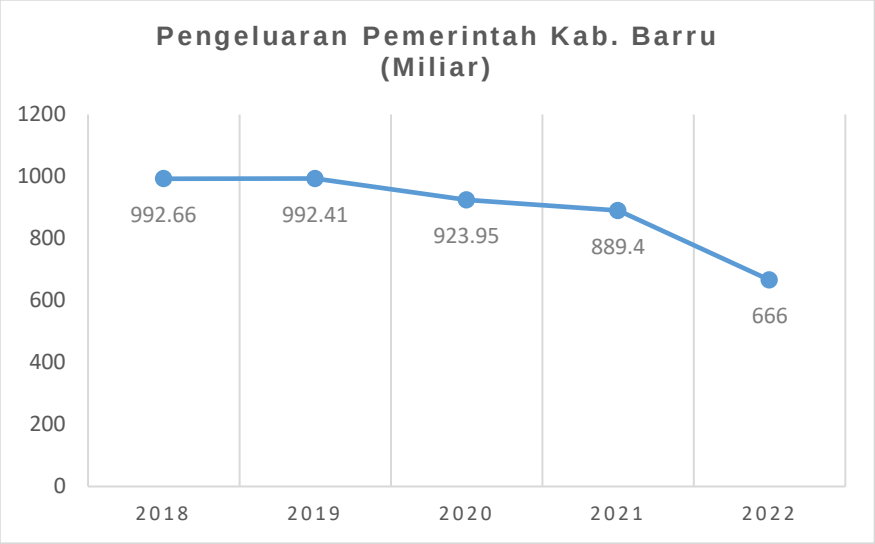

Sumber: BPS Kab. Barru 2023

Grafik 1.2 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barru 2018-2022

Berdasarkan Grafik di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2022 pengeluaran pemerintah Kabupaten Barru terus mengalami penurunan. Pengeluaran pemerintah menurun secara bertahap setiap tahunnya, adapun penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan selisih dari tahun sebelumnya sebesar 223,4 miliar atau 25,12 persen.

Selain pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya akan diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Menurut Sukirno, (2013) Peningkatan jumlah tenaga kerja akan diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka yang meningkat apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Peningkatan jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi. Menurut Smith (Azulaidin A, 2021) peningkatan jumlah penduduk dinilai dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Sedangkan menurut teori Malthus (Suryani & Putri, 2020) pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Hal tersebut dapat terjadi jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diiringi dengan kualitas dan kemampuan yang dapat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dalam perekonomian. Berikut ditampilkan data jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir.

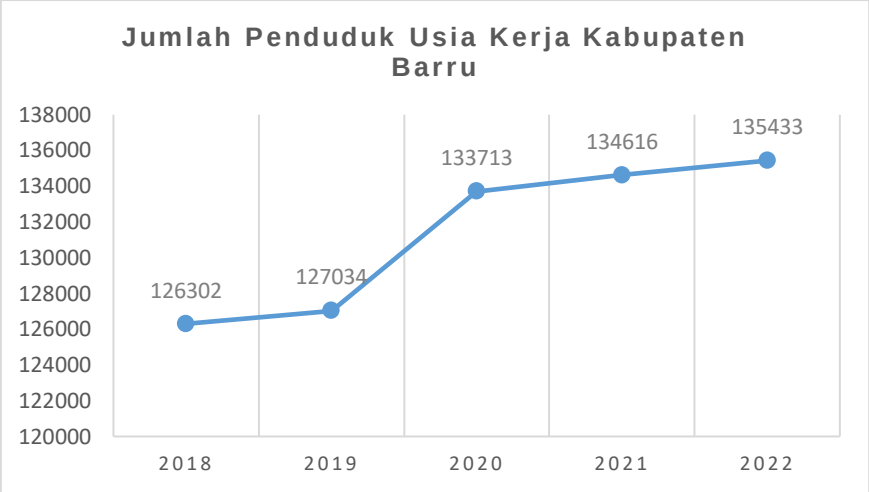

Sumber: BPS Kab. Barru 2023

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Barru 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan penduduk usia kerja di Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk usia kerja dari tahun 2018-2022 sebanyak 9.131 orang. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja disertai dengan angkatan kerja yang meningkat tidak selamanya memberikan dampak positif bagi suatu daerah termasuk Kabupaten Barru, sebab tidak semua penduduk memiliki kemampuan dalam bersaing didunia kerja.

Salah satu ukuran kualitas angkatan kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Penduduk yang sehat dan berpendidikan merupakan

modal utama mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan menjadi salah satu modal utama angkatan kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja karena semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (*the working capacity*) atau produktivitas seseorang dalam bekerja.

Persentase pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Barru masih didominasi berpendidikan Sekolah Dasar dibandingkan dengan pendidikan yang tamat SMA dan D1 ke atas, sedangkan dari karakteristik pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan selama lima tahun terakhir, pengangguran masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA/sederajat dengan proporsi lebih dari 40 persen, sementara persentase pengangguran terendah terdapat pada penduduk berpendidikan SMP dengan proporsi hanya lebih dari 10 persen.

Rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja akan berdampak pada kegiatan ekonomi di Kabupaten Barru. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis pekerjaan utama yang masih didominasi oleh sektor pertanian seperti pekerjaan tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Bekerja di sektor pertanian memiliki kelemahan karena hanya dilakukan pada musim tertentu saja, dalam artian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani harus menunggu dari masa tanam ke masa panen untuk bekerja kembali sehingga dampaknya akan mengakibatkan pada jenis pengangguran musiman, dimana hal ini terjadi karena adanya pergantian musim yang mengakibatkan tenaga kerja sektor pertanian menganggur atau beralih ke jenis pekerjaan lainnya dalam waktu tertentu. Selain itu, kesehatan juga dianggap penting karena dapat memberi pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi laju perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Barru sebab jika tidak diperhatikan dengan baik akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana setiap penduduk mengakses hasil pembangunan berupa pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu IPM menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan agar dapat membangun kualitas hidup masyarakat. IPM dibangun dari tiga dimensi dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan hidup sehat yang dapat dilihat dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimensi kedua yaitu pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi terakhir yaitu standar hidup layak yang dapat dilihat dari PNB per kapita.

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran telah dijelaskan oleh Todaro (2000) bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri karena memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya dalam menciptakan kesempatan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun faktanya peningkatan IPM setiap tahunnya tidak mampu menurunkan angka pengangguran yang tinggi dan cenderung berfluktuatif. Berikut ditampilkan data indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir.

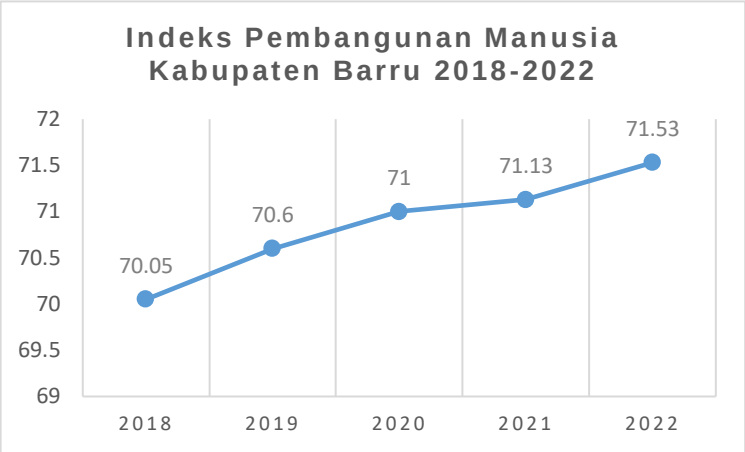

Sumber: BPS Kab. Barru 2023

Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru 2018-2022

Berdasarkan Grafik diatas, sejak tahun 2018, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Barru masuk dalam kategori tinggi dengan angka IPM sebesar 70,05, sehingga perolehan ini menjadikan IPM Kabupaten Barru menempati posisi ke-8 dari berbagai daerah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Posisi ke-8 ini merupakan posisi IPM Kabupaten Barru sejak tahun 2010 yang mampu bertahan hingga tahun 2022. Kenaikan IPM yang terjadi di Kabupaten Barru masih diikuti dengan naik turunnya tingkat pengangguran. Hal ini tentu menjadi masalah ekonomi yang harus diperhatikan secara serius agar kedepannya peningkatan IPM dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Barru.

Berdasarkan kajian permasalahan di atas, mengindikasikan bahwa perkembangan Pengangguran terbuka di Kabupaten Barru penuh ketidakpastian yang disebabkan kondisi internal maupun eksternal Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian dengan judul "**Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa angka pengangguran di Kabupaten Barru tergolong tinggi selama periode waktu 2000 - 2022 dengan rata-rata tingkat pengangguran per tahun sebesar 7,47 persen. Angka pengangguran yang tinggi merupakan suatu fenomena yang terjadi di Kabupaten Barru. Dampak dari tingginya angka pengangguran dapat dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Penduduk usia kerja yang meningkat setiap tahunnya diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Barru tidak disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha, sehingga berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang menjadi pengangguran. Mutu Sumber Daya Manusia yang dapat dilihat dari peningkatan IPM setiap tahunnya serta menempati posisi ke-8 mengindikasikan kualitas SDM di Kabupaten Barru cukup tinggi akan tetapi belum memberi dampak cukup baik terhadap TPT Kabupaten Barru yang berfluktuatif dan cenderung tinggi.

Atas dasar permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022?
2. Apakah Jumlah Penduduk Usia Kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022?
3. Apakah Mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Usia Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Mutu Sumber Daya Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru tahun 2000-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi instansi terkait, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barru sebagai pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang yang berguna sebagai bahan rekomendasi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah pengangguran di Kabupaten Barru.
2. Bagi akademis, tentunya sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran adalah suatu ukuran yang digunakan jika seseorang tidak bekerja tetapi mereka secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sadono Sukirno, 1994).

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja. Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (*labour surplus*). Jumlah pencari kerja melebihi jumlah kebutuhan tenaga kerja sehingga sejumlah pencari kerja menganggur (Susanto & Pratama, 2021). Selanjutnya International Labor Organization (ILO) mendefinisikan pengangguran yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang

selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001:4).

Pengangguran adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Menurut faktor-faktor penyebab terjadinya, pengangguran dibedakan kepada tiga jenis, yaitu (Simanjuntak, 2011:14):

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.
2. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.
3. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian adanya pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Masalah pengangguran tentu tidak muncul begitu saja tanpa suatu sebab. Pengangguran sebagai kondisi dimana orang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Abidin, dkk., 2020:265):

1. Pengangguran Terselubung

   Jenis pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari adanya urbanisasi yang sangat pesat di berbagai negara berkembang, sehingga

tidak semua orang yang berimigrasi mendapat pekerjaan dan di antara mereka banyak yang bekerja pada waktu-waktu tertentu setiap minggu atau bulannya. Hal ini umumnya terjadi pada sektor pertanian maupun sektor jasa, yang disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari sebenarnya yang dibutuhkan dan ciri-ciri pengangguran terselubung yaitu: (i) bekerja di bawah standar jam kerja, (ii) bekerja tidak sesuai dengan keahlian, dan (iii) bekerja di tempat yang telah jenuh tenaga kerja.

2. Setengah Menganggur

   Tenaga kerja yang bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia secara memadai, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3. Pengangguran Terbuka

   Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat dari rendahnya pertambahan lapangan kerja dibanding tenaga kerja. Dengan demikian, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sukirno, 2000).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: (Boediono,1999)

a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai berpengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. *Transfer payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Sejalan dengan itu, Rostow dan Musgrave mengemukakan pengeluaran pemerintah yang terdistribusi dalam 3 tahap pembangunan ekonomi, yakni: 1) tahap awal; 2) tahap menengah; dan 3) tahap akhir.

1) Tahap awal pembangunan ekonomi, investasi total pemerintah yang besar diharuskan untuk penyediaan berbagai macam sarana dan

prasarana, seperti layanan pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

2) Tahap menengah, pengeluaran pemerintah untuk investasi tetap dilakukan seiring dengan mulai meningkatnya investasi swasta agar dapat menuju tahap lepas landas.
3) Tahap akhir dan seterusnya, pengeluaran pemerintah dialihkan dari penyediaan sarana ekonomi kepada pengeluaran untuk layanan-layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program layanan kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar, namun rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin mengecil (Mangkoesoebroto, 1993).

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi oleh gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta.

Menurut Keynes (Muhammed, 2014) pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Dalam hal ini Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan antara belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, yang pada selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Konsep dan definisi angkatan kerja yang digunakan mengacu kepada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk usia kerja (digunakan 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun). Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah pensiun atau berusia lanjut. Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja, termasuk didalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah serta Ibu rumah tangga. Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga Kerja (manpower) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa (Anggoro, 2015)

Menurut Geli, dkk (2021) jumlah penduduk yang semakin besar berdampak pada semakin besarnya jumlah angkatan kerja. Hal ini berarti semakin banyak pula orang yang mencari kerja atau pengangguran, dan agar dapat mencapai keadaan yang seimbang maka mereka harus tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi bagi perekonomian karena harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan usaha untuk memperkecil tingkat pengangguran, sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi

diharapkan pertambahan lowongan pekerjaan akan lebih tinggi daripada jumlah pencari kerja yang ada.

2.1.4 Mutu Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya, baik kemampuan secara fisik maupun non fisik. Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik (physical quality) dan aspek non fisik (non physical quality) yang meliputi kemampuan bekerja, berpikir, dan memiliki keterampilan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas fisik dapat ditempuh melalui program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik dilakukan upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia (Notoatmodjo, 2003).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dalam hal kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Ketiga indikator tersebut adalah indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (Rahutami, 2011).

Teori pertumbuhan baru (*endogen*) yang dipelopori oleh Paul Romer & Robert lucas menekankan pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia *(human capital)* dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang akan naik sehingga mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Pengukuran pembangunan manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. Pengukuran ini disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Menurut BPS (2021), IPM dibangun dari tiga dimensi dasar untuk mengukur kualitas hidup. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Harapannya adalah tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Seseorang dengan tingkat kesehatan yang baik, diasumsikan dapat hidup lebih lama dibandingkan seseorang dengan tingkat kesehatan yang lebih rendah. Dalam penghitungan IPM digunakan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) digunakan sebagai indikator kesehatan. AHH adalah perkiraan usia rata-rata, atau jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Sehingga AHH biasa juga disebut dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH).

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Pada dimensi pengetahuan, terdapat indeks pendidikan yang digunakan dalam penghitungan IPM. Indeks pendidikan diperoleh dari rata-rata indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Hasil perhitungan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berdampak langsung terhadap pencapaian nilai IPM suatu daerah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Semakin tinggi partisipasi penduduk untuk bersekolah akan meningkatkan nilai HLS.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang telah digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS-nya adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia tersebut pendidikan sudah berakhir. Batas 25 tahun ini juga merupakan standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*).

Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang erat hubungannya dengan ekonomi. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya perekonomian. Indeks pengeluaran merupakan komponen yang mewakili dimensi ini pada penghitungan IPM di Indonesia. Dalam mengukur standar hidup layak, UNDP menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sementara itu BPS dalam hal ini menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*)

untuk membentuk suatu indeks pengeluaran. Sehingga terdapat dua komponen yang akan memberi pengaruh terhadap output komponen pada dimensi ini yaitu pengeluaran perkapita dan daya beli masyarakat.

Kemiskinan adalah masalah yang mempengaruhi pengeluaran penduduk. Penduduk miskin cenderung memiliki pengeluaran yang kecil dan dapat terjadi adanya akses terbatas terhadap standar hidup layak. Sementara itu, secara internal kemiskinan juga mempengaruhi daya beli. Kemudian keterjangkauan barang dan jasa di suatu wilayah mempengaruhi daya beli di sisi eksternal, yang dapat ditinjau dari sebuah indikator yaitu inflasi. Penanganan pada dua sisi yaitu berupa pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai IPM dari dimensi standar hidup layak ini.

Penghitungan IPM untuk tingkat regional telah dimulai sejak tahun 1996, yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Sejak tahun 2004, penghitungan IPM tingkat regional mulai dilakukan rutin setiap tahun. Kemudian pada tahun 2015 telah diterapkan metode terbaru dalam penghitungan IPM dengan melakukan penyesuaian beberapa indikator. Hasil penghitungan IPM tahunan ini dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi tiap daerah, IPM dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu

Beberapa indikator telah mengalami pergantian agar hasil pengukuran tetap relevan. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

- mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
- mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Metode baru IPM dimaksudkan untuk menyempurnakan metode yang sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dari aspek agregasi indeks, penggunaan rata-rata geometrik akan meminimalkan efek capaian satu dimensi ditutupi oleh capaian dimensi lain. Sehingga untuk mendapatkan nilai pembangunan yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh nilai yang sama-sama baik. Artinya, pembangunan harus bergerak seimbang di tiga dimensi tersebut. Kemudian dari sisi indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan karena tidak dapat menggambarkan secara utuh kualitas pendidikan. Selain itu, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PNB menggantikan PDB, sehingga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat dan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan multiplier effect (efek pengganda) pada sektor-sektor perekonomian lainnya. Semakin tingginya kegiatan ekonomi akibat dari effect multiplier tersebut maka akan semakin dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Sukirno, 2000).

Belanja modal sangat berperan penting karena bermanfaat untuk jangka panjang dalam memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, dimana manfaatnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Apabila suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai maka dapat mengundang para investor untuk melakukan investasi, sehingga dampaknya pada pembukaan lapangan kerja baru untuk masyarakat (Wiraswasta dkk, 2018).

2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk Usia Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Kenaikan jumlah penduduk yang dialami suatu wilayah akan berakibat pada kenaikan jumlah angkatan kerja di wilayah tersebut. Tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, dimana pada akhirnya jumlah angkatan kerja yang bertambah tersebut tidak dapat didistribusikan secara keseluruhan ke lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Pitartono & Hayati (2012) bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran, yang artinya bahwa semakin besar jumlah penduduk maka diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran.

2.2.3 Hubungan Mutu Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui human capital yang tercermin pada tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat dan penurunan tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes

bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang mengindikasikan peningkatan permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Jika permintaan agregat rendah, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan sering terjadi pengangguran. Menurut Hukum Okun disebutkan bahwa produktivitas disebabkan oleh indeks pembangunan manusia yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Herawati, M. dkk., 2020).

Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan beberapa teori pengangguran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengangguran mempunyai hubungan yang negatif melalui tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya ketika nilai IPM rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

2.3 Tinjauan Empirik

Firdhania & Muslihatinningsih (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Adapun jenis data yang digunakan adalah *time series* dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif

statistik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.

Kurnianto & Primandhana, (2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi (X1), Angkatan Kerja (X2) dan IPM (X3) terhadap Pengangguran (Y) Provinsi Banten 2009-2020. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap pengangguran, dan secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Secara parsial angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, dan secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Provinsi Banten.

Arifin, A. (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Jumlah Penduduk Usia Produktif (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dan Elastisitas Koefisien Regresi Linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (jumlah pengangguran) di Kabupaten Banyumas. Jumlah usia produktif berpengaruh positif, sehingga peningkatan jumlah angkatan kerja usia produktif akan meningkatkan jumlah pengangguran. Sedangkan baik pertumbuhan ekonomi maupun jumlah usaha kecil menengah berpengaruh negatif sehingga masing-masing variabel tersebut akan menurunkan jumlah pengangguran.

Aryanti, P., & Marhaeni, A. (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Moderasi (*moderating regression analysis*). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2) Upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (3) Upah minimum memperkuat pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

2.4 Kerangka Pikir

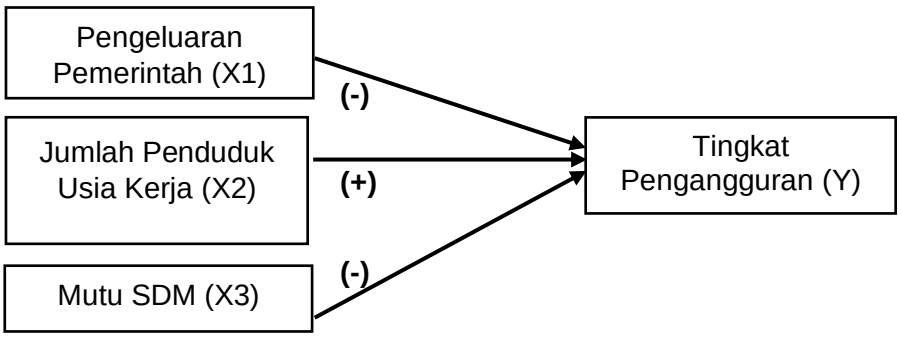

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru.
2. Diduga bahwa Jumlah Penduduk Usia Kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru.
3. Diduga bahwa Mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru.